



Jangan Persoalkan Istilah Klitih

■ Pencegahan dan Penindakan Lebih Penting



Karena dari langkah itu masalahnya bisa didekati dari berbagai sisi. Kalau hanya langkah-langkah reaktif saja, ya, enggak pernah selesai.

Prof Dr Sigit Riyanto
Pakar Hukum UGM

YOGYA, TRIBUN Sejak tewasnya pelajar berinisial D (18) karena disabet menggunakan gir saat melintas di Jalan Gedongkuning Kotagede, Kota Yogyakarta, Minggu (3/4), polisi meminta awak media untuk tidak lagi menggunakan kata *klitih* untuk menyebut aksi kejahatan jalanan tanpa motif yang jelas. Permintaan tak menggunakan kata *klitih* ini juga ditujukan kepada masyarakat luas.

Pakar Hukum Universitas

● ke halaman 11

APALAH ARTI SEBUAH KATA

- *Klitih* adalah bahasa Jawa berkonotasi positif yang sejalinya memiliki arti pencari kegiatan di kala senggang.
- Namun, kata ini memiliki payorasi, untuk menyebut kejahatan jalanan tanpa motif jelas yang mayoritas dilakukan remaja.
- Awal pergeseran makna ini memang bermula dari model permusuhan antar-geng remaja di DIY, yang tidak bertangkar secara terbuka seperti lawuran, tapi lebih berkeliang dengan motor untuk mencari musuhnya.
- Mulanya, target para pelaku ini jelas, yakni anggota geng atau pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh.
- Namun, dalam perkembangannya korban yang jatuh dari aksi ini kerap acak. Terutama orang yang tak tahu apa pun persialannya.
- Kivani, istilah *klitih* diminta untuk tak digunakan untuk menyebut kejahatan ini.
- Permintaan ini menimbulkan pro kontra, karena yang menjadi substansi adalah pencegahan aksi *klitih*, bukan soal penyebutannya.

Jangan Persoalkan

• Sambungan Hal 1

Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Profesor Dr Sigit Riyanto menganggap, seruan jajaran kepolisian untuk menghilangkan istilah *klith* merupakan sikap reaktif. Artinya, maka tidak akah banyak berdampak dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara yang masyarakat pertukan adalah rasa aman saat berada di luar rumah.

Sigit memberi saran, para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum harus mencari langkah-langkah yang kreatif untuk mencegah anak-anak muda berlaku kriminal. Apalagi soal kejahatan jalanan tanpa motif jelas yang sudah menelan banyak korban.

"Karena dari langkah itu masalahnya bisa dikecual dari berbagai sisi. Kalau hanya langkah-langkah reaktif saja, ya, enggak pernah selesai," tegas dia. "Preventif ya, represif juga perlu supaya ada efek jera. Karena ini bukan hanya untuk hari ini saja. Kita akan selalu mengulang berdebat bahasa, padahal dalam tanda kutip kita tahu kunci penyelesaian *klith*," imbuhnya. Jumat (8/4).

Dari segi hukum, Sigit menegaskan, masyarakat perlu diberikan ketenangan berupa *shock therapy* terhadap pelaku kejahatan jalanan. "Kalau pelaku sudah membahayakan apalagi nyawa menghilang, harus ditangkap, diproses hukum secara transparan. Memang ada diskresi pidana anak. Tapi proses itu harus transparan," tegasnya.

Terpisah, pakar kriminologi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Aroma Elmina Marthā SH MH mengatakan itu semua berkaitan dengan stigma. Ia sendiri tidak tahu mengapa polisi ingin mengganti kata *klith*. Dia menduga, penggantian tersebut dilakukan agar *klith* tidak memiliki makna negatif.

Seperti diketahui, *klith* sendiri sebenarnya merupakan bahasa Jawa yang memiliki konotasi yang mengarah pada kegiatan jalan-jalan, mencari suasana dengan mengobrol atau apa pun untuk mengisi waktu luang, tentunya dengan kegiatan yang positif.

"Monggo saja kalau mau diganti, mau dihapuskan,

tapi harus dijelaskan. Polisi harus memberikan penjelasan bahwa *klith* yang saat ini sedang diperbincangkan itu bukan kenakalan remaja. Itu sudah kejahatan karena menyerang orang hingga menyebabkan kematian," jelasnya kepada *Tribun Jogja*, Jumat (8/4).

Jika *klith* adalah kejahatan, maka setiap pelakunya bakal terkena ancaman pidana yang membuat mereka betul-betul sulit untuk mencari penghidupan. Menurut Aroma, titik permasalahan bukan pada istilah, melainkan ada regulasi yang mengakibatkan *klith* ini tidak segera tertangani dengan baik.

Fokus Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW), Ba Haruddin Kamba mengakui, belakangan istilah *klith* memang mengalami pergeseran makna sangat frontal. Dari sebuah aktivitas jalan-jalan dan sekadar mencari angin, menjadi sebuah tindak kejahatan jalanan tanpa motif jelas, tak jarang berbekal senjata tajam untuk melukai sasaran secara acak.

"Iu harus diakui, makna *klith* sejatinya bagus, ada nilai positifnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, karena muncul kasus, jadi ke kejahatan jalanan yang pelakunya didominasi remaja, dan itu acak," cetus Kamba.

"Makanya, kalau mau diganti tawuran, itu beda, karena kan tawuran itu biasanya janjian ke musuh, sudah sama-sama tahu identitasnya. Tapi, kalau *klith* cenderung acak, dan antara korban dan pelaku tidak kenal," tambahnya.

Oleh sebab itu, sendainya terus menerus sebatas berdebat soal istilah *klith*, maka pihak-pihak yang sejatinya punya kekuatan dan kewenangan bakal kehabisan energi. Alangkah baiknya, lanjut Kamba, energi tersebut dikerahkan untuk penanganan yang sifatnya pasti.

"Tangkap seluruh pelaku. Ciplakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya yang beraktivitas pada malam serta dini hari. Lakukan razia dan patroli secara konsisten, tidak hanya saat ramai kasus di mediasi," bisanya.

Kalaupun mengaku khawatir, jika pihak-pihak berwenang hanya bergetut pada istilah, kasus *klith* atau jika disebut dengan istilah lain, kejahatan jalanan tanpa motif jelas, yang belakangan

terus bermunculan ini bisa menjadi kabur. Ia menilai, pro kontra terkait pergeseran makna harus disudahi, agar penyelesaiannya bisa semakin masif dan konsisten.

"Tak usah capai-capai ngurusi istilah. Di beberapa daerah sekarang juga pakai istilah *klith* untuk kejahatan jalanan, kemarin saya lihat di Semarang, Boyolali, *klith* juga itu. Kalau semua ngurusi istilah, ya, buang-buang energi, fokuskan saja ke penanganan," pungkasnya.

Senada, aktivis sosial, Elanto Wijoyo membenarkan ada pergeseran makna *klith* di beberapa kelompok. Namun, hal itu bukanlah substansi dari masalah yang harus segera diurai dan dicarikan solusi pemecahannya ini. "Ini malah bikin bingung," terangnya. "Kalaupun kalau cuma penggantian istilah, itu malah membingungkan dan menimbulkan keaduan yang tidak perlu," jelas Elanto.

Keaduan itu sudah terjadi. Masyarakat bereaksi pada ide yang memintakan warga tidak lagi menggunakan *klith* untuk melabeli kejahatan jalanan tanpa motif jelas, terutama yang dilakukan oleh remaja. "Hal yang sekarang masyarakat perlukan adalah kebijakan yang konkret dan tegas, baik dari polda maupun aparat, agar bisa segera ada landasan hukum untuk penindakan dan pencegahan," tegasnya.

Dilihat dari polanya, penindakan dari aksi kejahatan jalanan yang dilakukan mayoritas anak-anak remaja itu tidak benar-benar memiliki efek jera. "Aksi kriminalitas jalanan di Yogyakarta dengan pola sebagai *klith* seperti ini sudah terlihat sejak tahun 2014, dan hingga kini, (tahun) 2022, masih terus berulang," ujarnya.

Memang, sepanjang catatan *Tribun Jogja*, istilah *klith* sudah digunakan para pelaku kejahatan jalanan tanpa motif jelas ini sejak awal dasawarsa 2010-an. Yang menjadi berbeda adalah sasarannya. Jika dulu tergetnya adalah orang yang dianggap sebagai musuh, entah itu dari sekolah lain atau geng lain, kini target dan korbannya kerap sekali sangat acak. Hal inilah yang memicu kekhawatiran masyarakat. Terlebih kasus terus berulang dan menelan korban. (hda/ard/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005